

**FOOD ESTATE DALAM PERSPEKTIF POLITIK PERTAHANAN NEGARA DI
KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Akhmad Syafruddin¹, Syahrin Badrin Kamahi², Yohanes Jimmy Nami³, Boli Tonda Baso⁴

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email Korespondensi: akhmad.syafruddin@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

Belu Regency, East Nusa Tenggara Province, is located in the border area of the Republic of Timor Leste and geographically has dry land that can be a threat of drought, causing low agricultural productivity and food scarcity. Food scarcity may lead to food vulnerability and disrupts national defense. The research aims to find out how far food estate as a state land strategy can solve the problem of food vulnerability in society. This research approach uses qualitative methods with a case study type. Data are collected through FGD, interviews, observation, and documentation. The research found that the food estate program in Belu Regency did not run well and was unable to solve food problems in Belu Regency. There are several reasons behind this result, such as technical factors of unpreparedness of production land and non-technical factors of socio-cultural transformation of society. However, from the national defense perspective, Food Estate can influence the security of the people in the RI-Timor Leste border region. In conclusion, the success of the Food Estate program in Belu Regency is highly dependent on collaboration between the local government and the community. It is because the national government has prepared all the supporting infrastructure. Several non-technical issues must be resolved through professional and ongoing assistance and training. Thus, the goal of self-sufficiency by 2024 can be reached.

Keyword: *Belu; Food Estates; Food security; National Defense.*

ABSTRAK

Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di wilayah perbatasan Negara Republik Timor Leste, secara geografis memiliki lahan kering yang dapat menjadi ancaman terjadi kekeringan, menyebabkan rendahnya produktifitas pertanian dan kelangkaan pangan. Kelangkaan pangan dapat menyebabkan kerentanan pangan yang dapat berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat yang kemudian mengganggu pertahanan Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana food estate sebagai strategi pertahanan Negara dapat menyelesaikan persoalan kerentanan pangan di masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui fgd, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ditemukan bahwa program food estate di Kabupaten Belu belum berjalan secara baik dan belum dapat menyelesaikan persoalan pangan di Kabupaten Belu. Ada beberapa penyebab diantaranya; faktor teknis ketidaksiapan lahan produksi dan faktor non teknis transformasi sosial budaya masyarakat. Kendati demikian dalam perspektif pertahanan Negara Food Estate dapat memberikan dampak bagi keamanan masyarakat di wilayah perbatasan RI-Timor Leste. Kesimpulan, keberhasilan program Food Estate di Kabupaten Belu sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, karena pemerintah nasional telah menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung. Beberapa persoalan non teknis harus diselesaikan melalui pendampingan dan pelatihan secara profesional dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan kemandirian di tahun 2024.

Keyword: *Belu; Food Estate; Ketahanan Pangan; Pertahanan Negara.*

PENDAHULUAN

Studi-studi terdahulu tentang pertahanan Negara sebagian besar fokus pada pertahanan Negara bentuk tradisional yang menempatkan militer sebagai kekuatan dan alat pertahanan Negara. Studi tersebut dapat dilihat pada (Kasenda et al., 2020) tentang analisis profesionalisme prajurit TNI angkatan laut dalam mendukung pertahanan Negara di komando armada, studi (Hidayat, 2018) diplomasi pertahanan Indonesia: amalgam militer-sipil, studi (Darmawan et al., 2020) kerjasama kementerian pertahanan Republik Indonesia daewoo *shipbuilding marine engineering* dalam pengadaan kapal selam sebagai upaya pemenuhan minimum essential force militer republik Indonesia, studi (Sari et al., 2020) peran lembaga pertahanan dalam menangani pandemi Covid-19. Penelitian diatas menjelaskan bahwa Negara dapat menjaga pertahanan dan keamanan melalui penguatan militer seperti prajurit profesional serta memiliki peralatan perang yang canggih. Disisi lain menurut hasil studi literatur, peneliti tidak menemukan adanya penelitian tentang food estate yang dilihat dalam perspektif pertahanan Negara non tradisional dengan fokus pada kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Merujuk hal diatas urgensi penelitian ini berusaha mengisi kekosongan yang belum dilakukan peneliti terhadulu dengan focus pada pertahanan Negara non militer atau non tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan food estate dalam perspektif politik pertahanan Negara di kabupaten Belu Provinsi NTT. Pertahanan Negara dilihat melalui bagaimana keberhasilan program food estate dapat menyelesaikan persoalan ketahanan pangan di Kabupaten Belu dan Provinsi NTT pada umumnya. Permasalahan faktor geografis dengan curah hujan yang rendah menjadikan tanah kering dan tandus sedangkan penduduk NTT 95% profesi sebagai petani. Kondisi ini menyebabkan masyarakat NTT mengalami kesulitan untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sebelum pandemi COVID-19, lebih dari 20% penduduk NTT hidup di bawah garis kemiskinan. Di tahun 2019, NTT tercatat sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi ketiga setelah Papua dan Papua Barat. Dampak pandemi mendorong peningkatan masyarakat miskin di Indonesia, termasuk di Provinsi NTT. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Semester II tahun 2020 mencatat persentase penduduk miskin di NTT sebesar 21,21% dari yang sebelumnya 20,62% pada Semester II tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, terdapat lebih dari 44 ribu penduduk NTT yang jatuh ke jurang ke miskin di tahun 2020 akibat pandemi. Persoalan kekeringan dan kemiskinan dibutuhkan keseriusan semua pihak dalam mengatasi permasalahan pangan dan gizi dan mendorong upaya-upaya penurunan kerentanan masyarakat terhadap kerawanan pangan melalui food estate.

Pengembangan program Food Estate di Kabupaten Belu telah menghabiskan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2015-2018 sebesar 497 Milyar (Kementerian PUPR) untuk pembangunan bendungan Rotiklot yang dapat digunakan sebagai sumber air bagi petani yang berada di wilayah food estate khususnya desa Fatuketi. Berikut adalah lokasi food estate di kabupaten Belu dapat dilihat pada table 1 dibawah ini:

Tabel 1. Lokasi Food Estate Kabupaten Belu

Lokasi Kecamatan/Desa	Komoditi/ Luas (Ha)		Jumlah	Kelompok Petani
	Jagung	Padi		
1. Kakuluk Mesak	128	281	409	48
Fatuketi	53	281	334	40
Leosama	75	-	75	8
2. Tasifeto Timur	20	130	150	14

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

Umaklaran	20	70	90	8
Manleten	-	60	60	6
Total	148	411	559	62

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Belu

Berdasarkan table 1 diatas, luas lahan food estate 559 ha terdiri dari luas lahan padi 411 ha dan jagung 148 ha. Untuk lahan jagung berada di Kecamatan Kakuluk Mesak Desa Fatuketi/Rotiklot 53 ha, Desa Leosama 75 ha, dan Kecamatan Tasifeto Timur Desa Umaklaran 20 ha. Sedangkan untuk lahan padi di Kecamatan Kakuluk Mesak Desa Fatuketi 281 ha, Kecamatan Tasifeto Timur Desa Umaklaran 70 ha dan Desa Manleten 60 ha. Keberhasilan food estate di kabupaten Belu akan dipengaruhi oleh factor iklim. Studi FAO (2016) menyatakan bahwa perubahan iklim berdampak negatif bagi produktivitas pertanian yang kemudian mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Menurut WFP (2014) bahwa perubahan iklim sebagai faktor pengganda risiko terhadap kerawanan pangan seperti terjadinya bencana alam dan perubahan iklim. Untuk itu keberhasilan food estate menjadi factor penting sebagai strategi pemerintah dalam menanggulangi ancaman kelangkaan pangan, kesenjangan, serta kesejahteraan yang bisa saja mengganggu stabilitas keamanan nasional. Studi (Pujayanti, 2011) tentang kedaulatan pangan, negara dengan stabilitas pangan yang baik akan cenderung stabil merespon dinamika social politik dalam negeri. Pada titik ini food estate memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan *food security* yang juga relevan dengan konsep pertahanan Negara berbasis rakyat semesta. Food estate menjelaskan peran strategis masyarakat dalam konsep pertahanan itu sendiri. Sebagai salah satu bentuk proyek strategis nasional, food estate tentunya sangat menunjang *food security* yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kesenjangan kesejahteraan dimasyarakat, yang kemudian mempengaruhi *trust public* terhadap pemerintah. Kepercayaan publik dapat dilihat dari dinamika dan kontestasi demokrasi di tingkat daerah dan nasional. Seymour martin lipset dalam (Utami, 2019) tingkat demokrasi berbanding lurus dengan kondisi social dan kemakmuran sehingga semakin tinggi kemakmuran semakin besar peluang mewujudkan demokrasi.

Diskursus terkait pertahanan dan keamanan Negara telah berkembang dalam ruang politik nasional dan Internasional. Terdapat dua konsep pertahanan yaitu tradisional dan non tradisional atau kontemporer. Pertama Pertahanan tradisional melihat entitas negara sebagai aktor tunggal yang difokuskan pada upaya kekuatan militer sebagai benteng pertahanan dan bertanggungjawab dalam memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat. Walter Lipman melihat bahwa “suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang”. Sementara Bary Buzan dalam (Kusnanto, 2003) menawarkan 3 landasan keamanan nasional : landasan ideasional, landasan institusional, dan landasan fisik. Landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak dalam ruang lingkup teritorialnya; landasan institusional meliputi mekanisme kewarganegaraan termasuk Lembaga legislative dan eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional mencakup tentang “wawasan kebangsaan”. Kemudian Arnold Wolfers menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.

Kedua Pertahanan Negara non tradisional menjelaskan kemananan negara pada entitas *human security*. Menurut Caroline Thomas pertahan tidak hanya berkaitan dengan *nexus military-external* tetapi juga menyangkut dimensi-dimensi lain. Pendapat lain Thomas dan Mathews menjelaskan bahwa pertahanan tidak sebatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi Negara (termasuk di dalamnya) upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir. Kontribusi pemikiran Thomas dan Mathews terletak pada ruang lingkup keamanan yang tidak lagi terbatas pada dimensi militer sehingga muncul istilah *environmental security*, *food security*, *energy security*, dan *economic security* menunjukkan bahwa suatu entitas sosial atau politik dapat menghadapi ancaman di berbagai bidang kehidupan. Konsepsi model pertahanan diatas menurut David Honey dalam (Witarti & Armandha, 2018) menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan ancaman sejak pasca perang dingin dari ancaman militer menjadi ancaman non militer. Dengan demikian penelitian ini berusaha memperkaya khazanah keilmuan menjelaskan food estate dalam mewujudkan food security sebagai prasyarat terwujudnya pertahanan Negara di Kabupaten Belu Provinsi NTT yang juga sebagai jendela perbatasan langsung RI- RDTL.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus model deskriptif dengan maksud memberikan pemahaman mendalam, menyeluruh, rinci, dengan memberikan penjelasan secara luas bagaimana food estate dapat menjadi strategi dalam mewujudkan food security dalam mewujudkan pertahanan Negara di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang Food estate membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiah (A Muri Yusuf, 2014). Pemilihan Kabupaten Belu sebagai lokasi penelitian karena berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan Timor Leste, sehingga persoalan pertahanan Negara adalah hal yang vital dalam menjaga kedaulatan Negara. Kedua Kabupaten Belu memiliki Bendungan Rotiklot yang dibangun pemerintah pusat sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan food estate. Selain itu Kabupaten Belu juga merupakan daerah miskin ke 4 di Provinsi NTT yang secara langsung menjadi ancaman dalam pertahanan Negara.

Berkenaan dengan hal itu, maka proses pengumpulan data mengikuti metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, menurut Creswell (2016), meliputi wawancara mendalam, observasi, *focus group discussion (fgd)*, dan dokumen. Metode FGD dilakukan dengan kelompok petani yang berada di lokasi food estate. Untuk metode utama, yaitu wawancara dengan pihak terkait yaitu Kelompok Tani, Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPRD Kabupaten Belu, dan observasi dilakukan di lokasi food estate dan ditunjang oleh telaah dokumen dan literatur. Proses penggalan data dengan tiga metode itu dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, wawancara mendalam dilakukan dengan wawancara langsung (*face to face*) dan dalam bentuk diskusi atau dialog secara mendalam. Jadi, wawancara tidak dilakukan sekadar tanya jawab yang berpedoman *guide interviewed*. Sebelum wawancara, akan dijelaskan secara langsung tujuan penelitian, meminta persetujuan informan, serta memastikan hak, kepentingan, dan keinginan informan akan menjadi pertimbangan utama dalam publikasi penelitian. Sementara itu, kerahasiaan informan akan dijaga dalam penelitian ini. Selain itu, wawancara juga akan menggali pengalaman terkini dan komunitas yang diteliti. *Kedua*, observasi dilakukan dengan langsung turun ke lapangan mengamati aktivitas praktik food estate yang dilakukan kelompok tani, kondisi social, budaya, politik dalam menunjang terlaksananya food estate. *Ketiga*, pengumpulan literatur terkait topik penelitian, khususnya naskah-naskah atau dokumen yang ada. Analisis data berlangsung serentak dengan pengumpulan data. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, seperti disebut Neuman (2011) dan Creswell (2016), peneliti yang menjadi instrumen penting dalam penelitian. Karena itu seorang peneliti tidaksekadar mengumpulkan data, melainkan juga terlibat dalam memahami dan memberi penilaian-penilaian. Karena itu, dalam pencarian data, proses menyelidiki, menulis catatan lapangan, menyusunnya secara sistematis, dan mengintegrasikannya satu sama lain dilakukan secara serentak. Inilah proses analisis data kualitatif menurut Neuman (2011). Selama analisis data ini, mengikuti Miles dan Huberman (1994), data-data yang ditemukan akan disusun secara kategoris dan kronologis, serta dibuat daftar ide-ide yang penting.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

Secara terus menerus data-data yang telah disusun tersebut akan direfleksikan dan ditinjau ulang. Karena penelitian ini dilakukan pada semua actor yang terlibat di food estate, khususnya petani sejarah kultural memiliki praktik dan istilah-istilah tersendiri yang sering kali tidak dipahami dalam ragam social yang berbeda, proses *coding* data akan dilakukan secara konsisten dalam proses analisis. Memang, coding data, seperti disebut Creswell (2016), umum digunakan dalam analisis data kualitatif. Hanyasaja, coding data yang dimaksudkan di sini adalah mengumpulkan dan mensegmentasi kalimat dan istilah tertentu. Istilah atau kalimat spesifik yang berasal dari komunitas atau masyarakat adat dalam kehidupan mereka sehari-hari akan dipertahankan secara konsisten.

PEMBAHASAN

Food estate dalam Perspektif Politik Pertahanan Negara

Penelitian ini memberikan perspektif lain tentang arti pertahanan yang sebelumnya bersumber dari kekuatan militer menjadi pertahanan Negara yang bersumber dari *human security*. Politik pertahanan Negara dianalisis melalui instrument food estate, sejauh mana dampak yang ditimbulkan bagi jaminan kesejahteraan masyarakat dan implikasi bagi pertahanan. Berdasarkan data yang diperoleh, Kabupaten Belu merupakan daerah miskin urutan ke 4 dari 21 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu ini menjadi ancaman serius bagi pemerintah apalagi Kabupaten Belu terletak di wilayah perbatasan dengan Negara Timor Leste dimana persoalan hak asasi manusia, pelayanan dan kesejahteraan menjadi isu penting bagi nasional maupun internasional. Sebagai wilayah perbatasan hasil penelitian ini memiliki relevansi untuk melihat pertahanan Negara dalam perspektif yang lebih luas yaitu pada level Negara, sejauh mana Negara dapat menciptakan keamanan di wilayah perbatasan Negara Timor Leste. Studi (Fadillah, Political, and 2021) melihat bahwa sejauh mana food estate dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan namun sebaliknya jika terjadi Kegagalan akan berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat secara lebih spesifik dapat dilihat pada level rumah tangga.

Untuk mengukur Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat ditinjau melalui pengeluaran rumah tangga, terutama dengan melihat pangsa pengeluaran untuk makanan dan non-makanan (IFRI, 2019). Pada rumah tangga miskin, menurut (FAO, 2011), mayoritas pengeluaran rumah tangga digunakan untuk membeli makanan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk makanan mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang rendah. Menurut BPS, pangsa pengeluaran pangan berbanding terbalik dengan kesejahteraan. Semakin rendah kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin besar. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan rumah tangga dapat menggeser pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan-kebutuhan non-pangan. Pengeluaran penduduk di Provinsi NTT masih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Menurut SUSENAS September 2020, rata-rata total pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi NTT sebesar Rp785.625,00 per bulan dan mayoritas (52,92%) dari total tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Proporsi pengeluaran per kapita untuk makanan tersebut merupakan penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 59,25% (Gambar 1). Dilihat menurut tempat tinggalnya, penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan cenderung mengalokasikan proporsi yang lebih besar untuk makanan (56,39%) di bandingkan penduduk di wilayah perkotaan (47,40%). Sebaliknya, penduduk perkotaan mengalokasikan pengeluaran lebih banyak untuk kebutuhan non-makanan (52,60%) dibandingkan penduduk di perdesaan (43,61%).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:

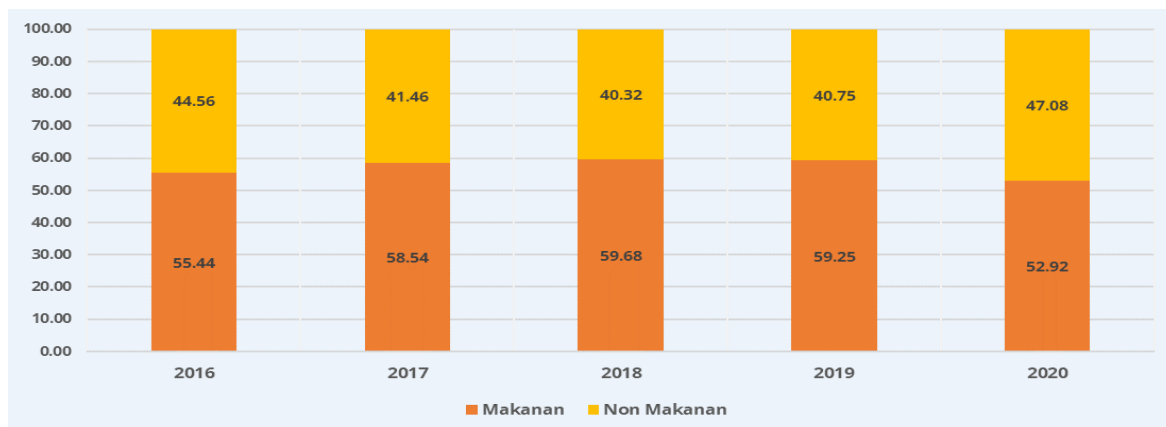


SINTA 5

PKP|INDEX



Gambar 1. Proporsi Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di NTT Menurut Jenis Pengeluaran.



Sumber: Badan Pusat Statistik September

Selain persentase penduduk miskin, salah satu indikator indeks ketahanan pangan komposit dari aspek akses pangan adalah persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan >65%. Data indikator tersebut diperoleh melalui data SUSENAS Maret 2020 yang diestimasi di tingkat kecamatan menggunakan Estimasi Area Kecil atau *Small-Area Estimation* (SAE). Kecamatan dikelompokkan ke dalam 6 kelas dengan titik potong yang ditentukan oleh Tim Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) Nasional.

Tabel 2. Sebaran Jumlah Kecamatan Persentase Rumah Tangga dengan pengeluaran Pangan >65%

Prioritas	% Rumah tangga dengan Pengeluaran Pangan > 65%	Kategori	Jumlah	Persentase
Prioritas 1	≥ 70	Sangat Buruk	104	34%
Prioritas 2	60 - <70	Buruk	63	20%
Prioritas 3	50 - <60	Agak Buruk	49	16%
Prioritas 4	40 - <50	Agak Baik	41	13%
Prioritas 5	30 - <40	Baik	16	5%
Prioritas 6	< 30	Sangat Baik	36	12%
Total Jumlah Kecamatan			309	100,00

Sumber: Hasil analisis FSVA NTT 2021 menggunakan data SAE dari SUSENAS Maret 2020.

Sebanyak 216 kecamatan (70%) masuk dalam gradasi merah, sedangkan 93 kecamatan (30%) masuk dalam gradasi warna hijau (Tabel 2). Prioritas 1 sebanyak 34% kecamatan masuk dalam kategori sangat buruk dengan proporsi rumah tangga dengan pengeluaran pangan 70% ke atas yang mengindikasikan bahwa masih banyak kecamatan yang mayoritas rumah tangganya kurang sejahtera. Namun, terdapat pula 36 kecamatan (12%) yang masuk kategori sangat baik, dengan proporsi rumah tangga dengan pengeluaran < 30%. Berdasarkan table 2 rumah tangga dengan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

prioritas 1, 2 dan 3 memiliki persentase sebesar 70%. Berdasarkan data diatas bahwa NTT memiliki kerentanan pangan yang tinggi. Sumber lain juga menjelaskan bahwa Ketahanan pangan nasional hanya bertahan 3 bulan dan untuk NTT dalam rentang 2 sampai 8 minggu (Pos Kupang 14 September 2022). Kondisi ini akibat terjadinya covid-19 yang berdampak secara makro, terjadi resesi ekonomi dan penurunan pendapatan masyarakat, terganggunya rantai pasok pangan yang mengancam ketahanan pangan (Balitbang Provinsi NTT, 2020). Studi (Wismayana & Pinatih, 2020) menjelaskan bahwa Pandemi dan tantangan ketahanan pangan, tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Indonesia yang memiliki ketergantungan impor bahan pangan kini semakin mengarah kepada kelangkaan pangan akibat terhentinya aktivitas ekonomi secara masif maupun aksi penimbunan bahan pangan. Sebagai sebuah program dan Strategi negara dalam mewujudkan keamanan pangan pada level masyarakat atas krisis pangan yang disebabkan terganggunya produksi akibat covid-19 (FAO), iklim yang tidak dapat diprediksi serta kondisi perang antara rusia dan ukraina menyebabkan dunia dalam ketidakpastian kebutuhan sumber daya energi dan pangan dunia (Zhou et al., 2023). Secara langsung maupun tidak langsung kondisi global dapat menyebabkan efek yang luas bagi kelangkaan pangan setiap Negara dan mengancam pertahanan Negara.

Sebagai program strategis nasional yang diagendakan tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional; memiliki tujuan untuk menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Belu. Pelaksanaan food estate terdiri dari 4 tahapan yaitu; 1) pengembangan produksi tahun 2021, 2) pengembangan hilirisasi tahun 2022, 3) pengembangan diversifikasi usaha tahun 2023, 4) Kemandirin pangan tahun 2024. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebelum program food estate, petani melakukan 1 kali tanam dalam setahun dan setelah keberadaan food estate dilakukan 3 kali tanam. Hasil tanam periode 1, 2 dan 3 dapat dilihat pada (table 3 dan table 4) yaitu; periode tanam ke-1 dilakukan di kecamatan Kakuluk Mesa (desa fatuketi, desa leosama) dan kecamatan Tasifeto Timur (desa Manleten, desa Umaklaran). Tanaman yang di garap yaitu sorgum dengan hasil 4 Ton/Ha dan jagung hasil 3,12 Ton/ha. Pelaksanaan tanam periode ini ditemukan permasalahan jaringan irigasi, Sprinkler yang belum memadai serta kekurangan air karena di puncak musim kemarau (Agustus-September 2021). Kondisi ini menyebabkan hanya desa fatuketi yang berhasil ditanam dan 3 desa lainnya belum dapat ditanami. Periode ke-2 (Desember 2021 – Maret 2022) food estate telah menunjukkan kemajuan dari lokasi proyek sebesar 559 Ha berhasil ditanami padi seluas 404 Ha, jagung 123 Ha dan hanya 32 Ha yang tidak berhasil ditanam karena lokasi tergenang air. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan periode pertama. Hasil provitas Padi rata rata 5,38 Ton/Ha dan provitas Jagung 3,39 Ton/Ha. Kemudian periode ke-3 (Maret 2022) hanya di tanam jagung pada lahan seluas 40 Ha. Persoalan yang dijumpai dilapangan adalah kelangkaan Pupuk, ketersediaan air, petugas petugas pengelola air yang belum optimal serta terbatasnya Sumber Daya Manusia petugas penyuluh pertanian.

Data diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan food estate belum berjalan dengan baik karena disebabkan oleh 2 Faktor yaitu teknis dan Non Teknis. Faktor non teknis berkaitan dengan sosial dan budaya masyarakat, tidak semua berprofesi sebagai petani. Perbedaan latar belakang pekerjaan menyebabkan etos kerja dibidang pertanian rendah, sehingga lahan tanam tidak dapat dioptimalkan. Sementara faktor teknis terjadi karena kondisi lahan pertanian belum siap untuk ditanam secara keseluruhan, ketersediaan sprinkler yang belum merata serta saluran irigasi yang belum berjalan secara baik. Factor lain juga yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan food estate adalah koordinasi pihak terkaik baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat lokal.

Jika dianalisis luas tanaman padi 419 Ha dengan produksi 5,38 Ton/Ha maka jika dikalkulasikan akan diperoleh 2254,22 Ton Beras/ Panen. Apabila kondisi ini dapat dilakukan dalam 3 kali panen dalam setahun akan diperoleh 6.762 Ton Beras/Tahun. Jika melihat kebutuhan beras di Kabupaten Belu sebesar 98,70 Kg Kapita per tahun, maka hasil dari *food*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

estate lebih besar dibandingkan jumlah kebutuhan perkapita. Sementara untuk luas tanam jagung 148 Ha dengan produksi 3,39 Ton/Ha akan diperoleh 501,72 Ton/Panen. Jika terjadi 3 kali panen/setahun akan diperoleh 1505 Ton/Tahun. Hasil ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan jagung sebesar 15,20 Kilogram kapita per tahun. Kondisi diatas adalah kalkulasi dimana lokasi dengan luas 559 Ha dapat ditanami secara keseluruhan. Namun Fakta bahwa tidak semua lahan dapat ditanami sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebutuhan pangan di Kabupaten Belu belum terpenuhi secara baik dan tentu menjadi ancaman bagi negara apabila tidak dilakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan hasil pertanian di wilayah food estate.

Keberhasilan food estate juga dapat dilihat tidak sebatas menyediakan stok pangan bagi masyarakat sebagaimana sejarah awal Food Security didasarkan pada *Food Availability Approach (FAA)* yang difokuskan ketersediaan pangan baik di tingkat nasional maupun internasional (Rindayati, 2009). Pendekatan ini memiliki kelemahan karena tidak memperhatikan aspek distribusi dan akses terhadap pangan sehingga ketika terjadi surplus pangan, masyarakat miskin tidak dapat memiliki akses untuk mendapatkan pangan secara merata. Kemudian sekitar tahun 1980 terjadi pergeseran dari konsep ketersediaan pangan kepada akses pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 didefinisikan sebagai terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kerangka konseptual ketahanan pangan dibangun berdasarkan 3 pilar utama yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Tiga pilar utama ini harus dapat dipenuhi sebagai strategi pertahanan Negara yang difokuskan pada dimensi politik, masyarakat, ekonomi, dan logistic sebagaimana dijelaskan dalam Gray (1999) dari Clausewitz dan Howard dalam artikelnya mengemukakan terdapat tujuh dimensi yang menjelaskan konsep strategi yang dipetakan ke dalam tiga kategori, yaitu pertama, dimensi strategi dalam kategori *People and Politics* yang terdiri dari individu, masyarakat, materi dan mentalitas, politik dan etika. Kedua, dimensi strategi dalam kategori *Preparation for War* yang meliputi ekonomi dan logistik, organisasi, administrasi militer, informasi dan inteligensi, doktrin dan teori strategi, dan teknologi. Ketiga, dimensi strategi dalam kategori *War Proper* yang terdiri dari operasi militer, pimpinan (dalam politik dan militer), geografi, pergesekan dan lawan. Pertahanan negara yang berbasis non militer ini beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada dibawah negara (*state actors*), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Rosana (2016) Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Ketahanan pangan yang lemah turut berkontribusi menurunkan ekonomi suatu negara serta politik keamanan nasional terganggu, sejarah mencatat telah terjadi di jaman sukarso pada tahun 1966 terjadi inflasi dan kelangkaan pangan serta di jaman suharso tahun 1999 yang menyebabkan kekacauan politik dan kedua pemimpin lengser dari jabatannya (Sianipar & Tangkudung, 2021).

Berdasarkan rujukan diatas ketahanan pangan harus memenuhi aspek *human security*. Keamanan tidak hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan negara dan kekuatan militer melainkan keamanan ditujukan pada upaya menjamin warga negara atau keamanan manusianya (Al Arab dan ali abas, 2007), pondasi keamanan adalah keadilan social dan kesejahteraan ekonomi (Collin 2005). Laporan UNDP menekankan human security yang memusatkan perhatian pada manusia diantaranya , keamanan ekonomi, keamanan makanan, keamanan Kesehatan, keamanan lingkungan, kemanan pribadi, keamanan komunitas dan keamanan politik (Susetyo, 2008). Pada level ini, tersedianya food estate

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

dalam mewujudkan ketahanan pangan (*food security*) bagi masyarakat Kabupaten Belu menjadi penting bagi ketersediaan pangan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi gap kemiskinan antara masyarakat kota dan desa khususnya daerah perbatasan yang menjadi benteng terakhir negara di wilayah perbatasan negara. Pengalaman food estate dapat dilihat pada studi (Lubis et al., n.d.) bahwa Pemerintah pusat telah menyiapkan lahan seluas 61.042 Ha di Provinsi Sumatera Utara yang tersebar di 4 Kabupaten yakni Humbang Hasundutan, Pakpat Barat, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Barat yang diyakini sebagai program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dimasa akan datang. Sejalan dengan itu (Marwanto & Pangestu, 2020) bahwa food estate yang dilakukan di kalimantan Tengah dengan memanfaatkan lahan bekas gambut yang diolah menjadi Kawasan terpadu lumbung pangan nasional. Penggunaan lahan gambut ini menandakan bahwa Negara krisis pangan. Secara global, Indonesia berada pada peringkat 69 dari 113 negara berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) tahun 2021 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit. Studi (Lasminingrat et al., n.d.) menjelaskan bahwa pemerintah melihat potensi krisis pangan sebagai ancaman nasional, sehingga perlu langkah-langkah terukur yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Krisis pangan akan ancaman pertahanan Negara melalui masalah masalah Demokratisasi, hak-hak azasi manusia, masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi, masalah sosial dan budaya (Perwita & Yani, 2005, hal 128-129). Karena itu membangun food estate merupakan langkah yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut. Seymour M.Lipset dan Robert Dahl dalam (Nugroho, 2015) bahwa kondusifitas suatu negara ditentukan oleh ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meredam ketegangan konflik politik serta semakin tinggi kesajahteraan akan semakin mungkin masyarakat untuk menjadi demokratis.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa program food estate di Kabupaten Belu belum berjalan secara baik karena terdapat beberapa persoalan diantaranya ; faktor teknis ketidaksiapan lahan produksi dan faktor non teknis transformasi sosial budaya masyarakat. Dalam perspektif pertahanan Negara kehadiran Food Estate memberikan dampak bagi ketahanan pangan bagi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan RI-Timor Leste. Keberhasilan program Food Estate di Kabupaten Belu sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, karena pemerintah nasional telah menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung. Keterlibatan semua element formal maupun informal dapat menjadi kerja kolaborasi yang kuat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan kebijakan food estate. Beberapa persoalan non teknis harus diselesaikan melalui pendampingan dan pelatihan secara profesional dan berkelanjutan sehingga hasil yang diharapkan menuju kemandirian di tahun 2024 dapat diwujudkan

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih diucapkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui program penelitian dana Dipa sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Belu, DPRD Kabupaten Belu, Universitas Pertahanan Belu, Kelompok Tani Serta TIM Peneliti Dosen dan Mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

A Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian gabungan*.
Darmawan, W., Alkadrie, J., & Sudirman, A. (2020). Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Engineering dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya Pemenuhan Minimum Essential Force Militer Republik Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(4). <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i4.26242>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

- El Bilali, H., Strassner, C., Ben Hassen, T., Yeny, I., Garsetiasih, R., Suharti, S., Gunawan, H., Sawitri, R., Karlina, E., Hadi Narendra, B., Ekawati, S., Djaenudin, D., Rachmanadi, D., Muhammad Heriyanto, N., & Takandjandji, M. (2022). Examining the Socio-Economic and Natural Resource Risks of Food Estate Development on Peatlands: A Strategy for Economic Recovery and Natural Resource. *Mdpi.Com*. <https://doi.org/10.3390/su14073961>
- Fadillah, A., Political, M. L.-J. Of G. And, & 2021, undefined. (2021). The Urgency of Food Estate for National Food Security in The Middle of The COVID-19 Pandemic. *Journal.Mengeja.Id*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.8>
- FAO. (2011). *The State Of Food Insecurity In The Word, How Does International Price Volatility Affect Domestic Economies And Food Security? Food and Agricultur Organization (FAO)Rome*.
- Hidayat, S. (2018). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA: AMALGAM MILITER-SIPIL. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i2.330>
- IFRI. (2019). *Poverty Prevalence and Correlates of Household Expenditure In Four Lowland Areas Of Rural Papua New Guenea*,.
- Kasenda, G. I. F., Djati, S. P., & Suprpto, S. (2020). Analisis Profesionalisme Prajurit TNI Angkatan Laut Dalam Mendukung Pertahanan Negara di Komando Armada I. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 6(2).
- Kurnia, A. W., Sundari, S., Purwanto, D. A., & Pertahanan, U. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CADANGAN PANGAN NASIONAL DALAM KONDISI KEADAAN DARURAT DI BADAN KETAHANAN PANGAN GUNA Mendukung PERTAHANAN NEGARA. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 6(1). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/593>
- Kusnanto, A. (2003). KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA, DAN KETERTIBAN UMUM Oleh: Dr. Kusnanto Anggoro. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*, 1–10.
- Lasminingrat, L., Negara, E. E.-J. P. & B., & 2020, undefined. (n.d.). The development of national food estate: The Indonesian food crisis anticipation strategy. *Jurnal.Idu.Ac.Id*. Retrieved October 25, 2022, from <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/1110>
- Lubis, M., Munawir, Z., Environmental, S. M.-J. Of, & 2021, undefined. (n.d.). Planning the Food Estate for Community Development and Welfare. *Ceeol.Com*. Retrieved October 25, 2022, from <https://www.ceeol.com/search/article-detail?Id=1016153>
- Marwanto, S., & Pangestu, F. (2020). Food Estate Program in Central Kalimantan Province as An Integrated and Sustainable Solution for Food Security in Indonesia. *Iopscience.Iop.Org*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/794/1/012068>
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Pujayanti, A. (2011). Politik pangan di era globalisasi 1. *Politica Vol. 2 No. 1 Juni 2011*, 2, 147–172.
- Rosana, E. (2016). NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37–53. <https://doi.org/10.24042/TPS.V12I1.827>
- Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. (2020). PERAN LEMBAGA PERTAHANAN DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865>
- Sianipar, B., & Tangkudung, A. G. (2021). Tinjauan Ekonomi, Politik dan Keamanan Terhadap Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19. *Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKOM)*, 3(1). <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/view/545>
- Susetyo, H. (2008). MENUJU PARADIGMA KEAMANAN KOMPREHENSIF BERPERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA DALAM KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

Lex Jurnalica Vol 6 No.1 Desember 2008, 6(1).

- Utami, P. J. (2019). BOOK REVIEW POLITICAL MAN: THE SOCIAL BASES OF POLITICS SEYMOUR MARTIN LIPSET NEW YORK: ANCHOR BOOKS, 1963. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 1–10.
- Wismayana, W. M., & Pinatih, N. K. D. A. (2020). Pandemi dan Tantangan Ketahanan Nasional Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(2), 93–100. <https://doi.org/10.55960/JLRI.V8I2.312>
- Witarti, D. I., & Armandha, S. T. (2018). Tinjauan Teoretis Konsepsi Pertahanan Dan Keamanan Di Era Globalisasi Industri Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(3), 87–106. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i3.371>
- Zhou, X. Y., Lu, G., Xu, Z., Yan, X., Khu, S. T., Yang, J., & Zhao, J. (2023). Influence of Russia-Ukraine War on the Global Energy and Food Security. *Resources, Conservation and Recycling*, 188, 106657. <https://doi.org/10.1016/J.RESCONREC.2022.106657>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

